

**LAPORAN TESIS**

**PELAYANAN TATA LAKSANA NYERI SEBAGAI UPAYA  
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA  
KABUPATEN BADUNG**



**A.A. GDE PUTRA SEMARA JAYA**

**21.C2.0018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

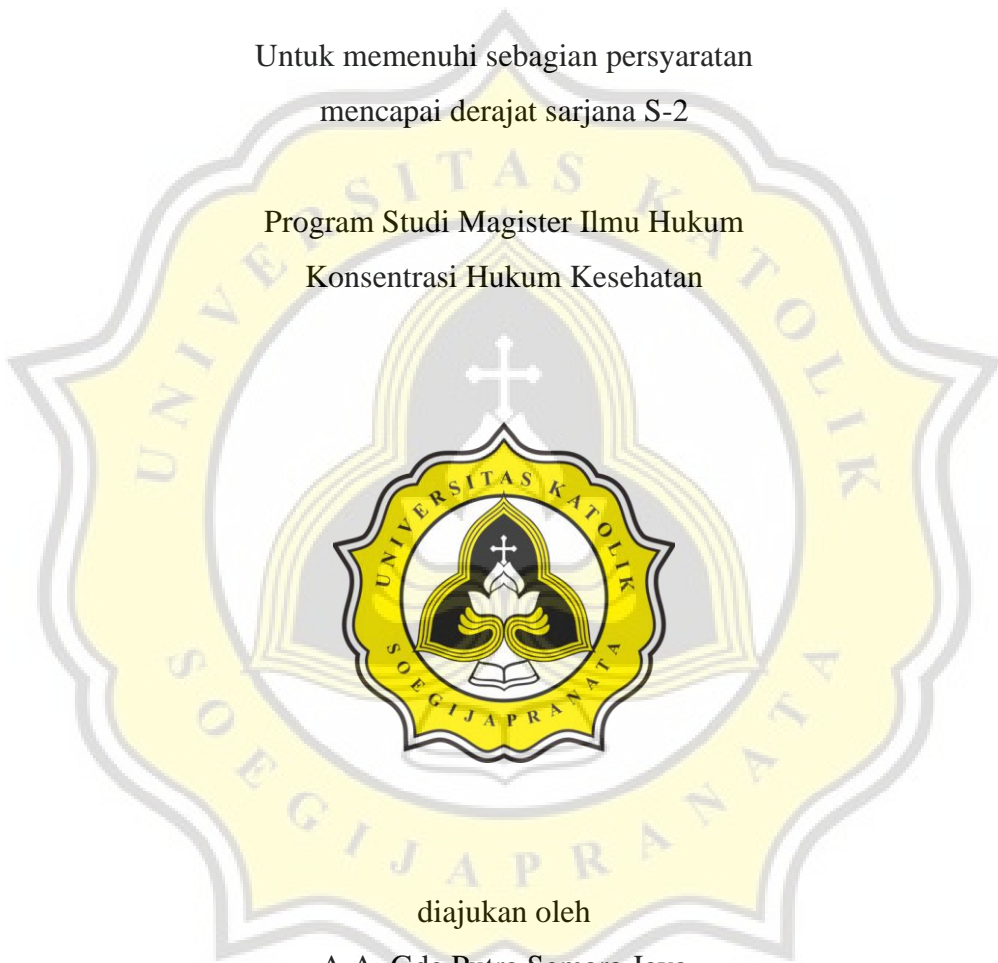
**2023**

**PELAYANAN TATA LAKSANA NYERI SEBAGAI UPAYA  
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA  
KABUPATEN BADUNG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

A.A. Gde Putra Semara Jaya

NIM 21.C2.0018

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2023

## ABSTRAK

Nyeri merupakan penderitaan bagi pasien, yang sangat penting untuk segera diatasi, bukan semata-mata terapi atas kelainan atau penyakit yang mendasarinya. Sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk berupaya mengenali, menilai, memahami, dan melakukan terapi nyeri yang dialami pasien. Upaya tersebut merupakan bentuk penghormatan dan pemahaman bahwa nyeri seringkali menjadi alasan utama mengapa pasien mencari perawatan ke rumah sakit. Pelayanan tata laksana nyeri belum sepenuhnya berjalan maksimal di beberapa rumah sakit. Pelayanan tata laksana nyeri sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Penelitian ini mengkaji secara yuridis sosiologis implementasi pelayanan tata laksana nyeri sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kabupaten Badung.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosio-legal (yuridis empiris, yuridis sosiologis), dengan spesifikasi penelitian eksplanasi. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Analisis dilakukan pada data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh.

Sebagai simpulan bahwa 1) Pelayanan tata laksana nyeri di rumah sakit telah memiliki dasar hukum dan bentuk pengaturan umum maupun khusus di tingkat nasional, namun bentuk pengaturan khusus di RSD Mangusada Kabupaten Badung belum terkini, lengkap, dan harmonis, 2) RSD Mangusada Kabupaten Badung dan tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan belum maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan tata laksana nyeri dikaji dari bentuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan berupa ketersediaan instrumen hukum, tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana. Pelanggaran kewajiban oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan memiliki dampak hukum. Di sisi lain, pasien dan keluarga sebagai penerima layanan masih memiliki kendala dalam menjalankan kewajibannya, dan 3) faktor yuridis, sosial, dan teknis diidentifikasi dapat memengaruhi implementasi pelayanan tata laksana nyeri di RSD Mangusada Kabupaten Badung.

**Kata Kunci:** tata laksana nyeri, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas kesehatan, rumah sakit.

## ABSTRACT

Pain is suffering for the patient and must be treated immediately, not merely the underlying disorder or disease. Healthcare workers need to recognize, assess, understand, and treat pain experienced by patients. This effort is a form of respect and understanding that pain is often the main reason patients seek hospital treatment. Pain management services have not been fully run optimally in several hospitals. Pain management is an effort to fulfill the right to health services and needs special attention to actualize the respect, protection, and fulfillment of human rights in the health sector. This study examines the implementation of pain management services as an effort to fulfill the right to health services, especially at the Mangusada Hospital of Badung Regency.

The research method used in this study is the sociolegal approach (empirical juridical, sociological juridical), with explanatory specifications. Primary data and secondary data were collected through field studies and literature studies. Analysis was performed on qualitative and quantitative data.

In conclusion, 1) pain management services in hospitals already have a legal basis with general and specific regulations at the national level, but the specific regulations at the Mangusada Hospital of Badung Regency are not up-to-date, comprehensive, and harmonious, 2) Mangusada Hospital of Badung Regency and health workers have not been optimal in providing pain management services in terms of fulfilling the right to health services in the form of the availability of legal instruments, health workers, infrastructure, and facilities. Violations of obligations by hospitals and health workers have legal implications, and 3) juridical, social, and technical factors are identified influencing the implementation of pain management services in Mangusada Hospital of Badung Regency.

**Keywords:** pain management, right to health services, right to health, hospital.